



Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur

I Putu Ananta Wijaya^{1*}, Ni Made Tisnawati²

¹⁻²Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Indonesia

Email: W.ananta2002@gmail.com¹, tisnawati@unud.ad.id²

*Penulis Korespondensi: W.ananta2002@gmail.com

Abstract. Poverty remains one of the main problems of economic development in East Nusa Tenggara (NTT) Province. The high poverty rate indicates that the economic growth that has occurred has not been fully able to improve the welfare of the community evenly. Regional governments through fiscal policies and increased investment are expected to be able to encourage economic growth while reducing poverty levels. Government spending is an important instrument in regional economic development because it functions to provide infrastructure, public services, education, and health. In addition, investment also has a strategic role in creating jobs, increasing productivity, and expanding community economic activities. However, the effectiveness of government spending and investment on economic growth and poverty reduction still varies from region to region. Several previous studies have shown that government spending and investment can increase economic growth and reduce poverty levels. However, there are also research results that show that government spending and investment have not been able to provide a significant impact due to the suboptimal quality of regional spending and low investment effectiveness. Based on these conditions, this study aims to analyze the effect of government spending and investment on economic growth and poverty levels in the regencies/cities of East Nusa Tenggara Province.

Keywords: East Nusa Tenggara Province; Economic Growth; Government Spending; Investment; Poverty Alleviation.

Abstrak. Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Tingginya tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pemerintah daerah melalui kebijakan fiskal dan peningkatan investasi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi daerah karena berfungsi menyediakan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, investasi juga memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperluas aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, efektivitas pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan masih berbeda-beda pada setiap daerah. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Akan tetapi, terdapat pula hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi belum mampu memberikan pengaruh signifikan akibat belum optimalnya kualitas belanja daerah serta rendahnya efektivitas investasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kata Kunci: Investasi; Pengeluaran Pemerintah; Pengentasan Kemiskinan; Pertumbuhan Ekonomi; Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. LATAR BELAKANG

penting sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan saling berkaitan, di mana pertumbuhan ekonomi yang menyentuh semua lapisan masyarakat dapat mengurangi kemiskinan jika didukung oleh kebijakan yang tepat. Dua instrumen utama yang berperan dalam proses tersebut adalah pengeluaran pemerintah dan investasi. Berdasarkan teori Keynes, pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat, mendorong produksi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Sukirno, 2016), sedangkan teori pertumbuhan Harrod-Domar menjelaskan bahwa investasi meningkatkan pembentukan modal, kapasitas produksi, dan produktivitas ekonomi. Todaro dan Smith (2015) menegaskan bahwa investasi, baik publik maupun swasta, juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja sehingga mampu mengurangi kemiskinan. Secara empiris, penelitian Putra dan Suryani (2021) serta Fauzi, Rahman, dan Lestari (2022) menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung penurunan tingkat kemiskinan. Hubungan antara pengeluaran pemerintah, investasi, dan kemiskinan terjadi melalui mekanisme pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan kapasitas produksi, pembangunan infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat sesuai konsep *trickle-down effect* (Todaro & Smith, 2015).

Namun, manfaat tersebut bisa maksimal jika pengeluaran pemerintah dan investasi difokuskan pada sektor-sektor yang produktif dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam masa otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya dan dana dengan baik agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik, mengurangi perbedaan pembangunan di berbagai wilayah, serta mempercepat upaya mengatasi kemiskinan yang merupakan tantangan utama dalam pembangunan daerah (Suryawati, 2005). Dalam mewujudkan otonomi daerah, penanganan masalah kemiskinan menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional dan daerah, khususnya sejak Undang-Undang tentang pemerintahan daerah mulai diberlakukan. Hal tersebut seharusnya menjadi kesempatan dan momentum untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan memperhatikan masalah-masalah khas di daerah setempat. Artinya, dengan menangani masalah kemiskinan, secara tidak langsung kita juga bisa mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi pemerintah daerah. Dengan sistem desentralisasi fiskal, pemerintah daerah sekarang memiliki kuasa yang lebih luas untuk merencanakan, menyusun, dan menerapkan kebijakan serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, dengan harapan bisa mengurangi jumlah penduduk yang miskin (Scott, 2002). Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses

desentralisasi adalah bahwa pemerintah daerah harus lebih cepat dan mudah dalam merespons kebutuhan masyarakat setempat. Desentralisasi fiskal saat diterapkan masih menghadapi berbagai masalah di tingkat daerah, sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan desentralisasi fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Kondisi geografis di NTT menjadi penyebab utama terbanyaknya penduduk miskin di wilayah tersebut, karena curah hujan yang rendah membuat tanah menjadi kering dan kurang subur. Situasi ini sangat berdampak pada sebagian besar penduduk NTT yang sebagian besar bekerja sebagai petani, sehingga memengaruhi produksi pertanian dan ketahanan pangan masyarakat setempat (Seo, 2023). Selain itu, daerah tersebut juga dipengaruhi oleh wilayah yang luas dan banyak area pegunungan, sehingga kedua daerah tersebut memiliki banyak sumber daya alam. Hal itu membuat akses antara kota dan desa menjadi sangat sulit, sehingga beberapa daerah sulit dijangkau, yang akhirnya mempersulit proses distribusi barang dan layanan. Keterbatasan infrastruktur ini membuat peluang ekonomi menjadi terbatas dan membuat masyarakat kesulitan mengakses pasar (Oki et al., 2021).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami fluktuasi selama periode 2017 hingga 2023. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi NTT tercatat sebesar 5,16 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 5,13 persen, pada tahun 2018. Tahun 2019 menunjukkan peningkatan kecil dengan pertumbuhan sebesar 5,24 persen. Namun, pada tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi 0,83 persen, yang diduga kuat dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang melanda secara global. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan pemulihan, yaitu sebesar 2,51 persen, pada tahun 2021 sebesar 3,05 persen pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 3,52 persen pada tahun 2023. Tren ini mencerminkan dinamika ekonomi provinsi yang masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan yang stabil, terutama dalam konteks pemulihan pasca pandemi (Badan Pusat Statistik, 2024). Tantangan yang harus diatasi adalah kecepatan penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih rendah, terutama di area pedesaan. Kemiskinan yang tinggi, terutama di daerah pedesaan, menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak berkembang, khususnya di bidang pertanian dan pariwisata. Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi tanda untuk menilai berhasil tidaknya pembangunan dan merupakan syarat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah pertumbuhan ekonomi tersebut harus memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok penduduk miskin (Siregar dan Wahyuniarti, 2008).

Provinsi NTT memiliki karakteristik geografis yang cukup unik dan menantang terdiri dari banyak kepulauan, topografi yang bervariasi (termasuk pegunungan, pulau terpencil, dan daerah dengan akses terbatas), serta distribusi populasi yang tersebar di banyak pulau dan wilayah pedalaman. Dalam konteks tersebut, meskipun terdapat upaya pembangunan dan intervensi kebijakan ekonomi, tingkat kemiskinan di NTT relatif tetap tinggi jika dibandingkan dengan provinsi-lainnya di Indonesia. Misalnya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada Tahun 2023 berada di angka 19,96 persen. Sebelumnya, angka kemiskinan ini tercatat sekitar 23,95 persen pada 2017 untuk wilayah yang spesifik, misalnya di Kabupaten Ende. Tren penurunan memang terjadi, namun prosesnya berjalan lambat dan dipengaruhi oleh kondisi geografis, infrastruktur, aksesibilitas serta heterogenitas antar kabupaten/kota.

Jika dilihat antar kabupaten/kota, fenomena perbedaan tingkat kemiskinan menjadi sangat nyata. Ada kabupaten-yang masih mencatat tingkat kemiskinan yang sangat tinggi setiap tahun nya seperti Kabupaten Sumba Tengah. Sebaliknya, ada kota yang menunjukkan angka jauh lebih rendah, misalnya kota-besar yang pusatnya aktivitas ekonomi relatif lebih padat dan akses lebih baik, misalnya Kota Kupang tercatat sekitar 8,61 persen di tahun 2023 di bawah rata-provinsi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor-geografis seperti akses ke pasar, jaringan infrastruktur jalan/transportasi, ketersediaan layanan publik sangat memengaruhi tingkat kemiskinan. Wilayah terpencil atau kepulauan yang sulit diakses cenderung memerlukan biaya lebih tinggi untuk distribusi barang dan layanan, dan sehingga rumah tangga miskin di daerah tersebut menghadapi hambatan lebih besar untuk keluar dari kemiskinan. Lebih jauh, dinamika temporal antara 2017 hingga 2023 juga menarik untuk dicermati. Misalnya, data untuk Kabupaten Ende menunjukkan bahwa pada tahun 2017 persentase penduduk miskin sebesar sekitar 23,95 persen dan menurun ke 22,86 persen pada 2023. Meskipun terjadi penurunan, angka kemiskinan masih di atas angka rata-provinsi maupun jauh dari indikator ideal. Di tingkat provinsi, meskipun angka kemiskinan telah menurun di bawah 20 persen seperti pada tahun 2023 yang sebesar 19,96 persen, tetapi perbedaan antar kabupaten/kota tetap besar. Hal ini menandakan bahwa kebijakan yang diterapkan secara umum mungkin tidak memiliki efek yang sama di semua wilayah, dan bahwa variabel lokal seperti kondisi geografis, investasi, pengeluaran pemerintah daerah, serta tingkat akses masyarakat ke fasilitas ekonomi menjadi sangat relevan. Fenomena ini menggaris bawahi beberapa implikasi penting pertama, pengentasan kemiskinan di NTT bukan hanya soal besarnya anggaran atau investasi, tetapi juga soal bagaimana anggaran dan investasi tersebut didistribusikan secara adil dan tepat sasaran di tiap Kabupaten/kota yang memiliki tantangan

berbeda. Kedua, analisis pada tingkat Kabupaten/kota menjadi sangat penting agar dapat melihat variabilitas efek dari pengeluaran pemerintah dan investasi dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Ketiga, kondisi geografis dan infrastruktur menjadi kerangka kontekstual yang tak bisa diabaikan dalam analisis misalnya, investasi di wilayah yang sulit dijangkau mungkin akan memerlukan lebih banyak biaya tambahan atau memiliki dampak yang lebih lambat dibandingkan wilayah yang lebih mudah aksesnya. Investasi memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), realisasi investasi tahun 2023 tercatat sebesar Rp 5,246 triliun, atau 98,8 persen dari target tahunan sebesar Rp 5,310 triliun (Suara NTT, 2024). Investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 3,407 triliun dengan 2.350 proyek, serta Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 1,839 triliun dari 466 proyek (DPMPTSP NTT, 2024).

Dominasi PMDN menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor domestik terhadap iklim usaha di NTT, seiring dengan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong kemudahan perizinan dan fasilitasi investasi. Sementara itu, kontribusi PMA meskipun lebih kecil secara nominal, tetap signifikan dalam hal inovasi dan teknologi. Secara keseluruhan, capaian investasi ini menunjukkan bahwa NTT mulai menjadi kawasan yang menarik bagi investor, baik lokal maupun asing. Investasi dari dalam negeri memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Posisi investasi modal dalam negeri yang paling penting adalah pendapatan nasional karena bisa memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah (Meilaniwati & Tannia, 2021). Penurunan jumlah masyarakat miskin di kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur terjadi karena adanya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi adalah proses menggerakkan sumber daya agar bisa membuat atau meningkatkan kemampuan menghasilkan barang atau uang di masa depan. Jika semua pekerja berkualitas terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, maka produksi barang dan jasa akan meningkat, yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi menjadi sarana penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan, seperti yang dicatat oleh Ocaya dan timnya pada tahun 2012. Dalam konteks NTT, penelitian mengenai keterkaitan antara pengeluaran pemerintah, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan masih sangat terbatas, khususnya pada tingkat kabupaten/kota. Padahal, kondisi sosial ekonomi antar wilayah di NTT memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan literatur empiris (research gap) dan memberikan bukti nyata mengenai sejauh mana kebijakan fiskal dan investasi di daerah dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. Hasil-hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kemiskinan bersifat tidak langsung, yakni melalui pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh Putra dan Suryani (2021) di Provinsi Bali membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang kemudian menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Sementara itu, Al-Mahdali dan Saharuddin (2023) menegaskan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kemiskinan dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi: peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan menurunkan kemiskinan. Pola hubungan semacam ini juga diyakini berlaku di NTT, di mana efektivitas pengeluaran pemerintah dalam menekan kemiskinan bergantung pada kemampuan daerah dalam memanfaatkan belanja publik untuk memperkuat aktivitas ekonomi produktif. Selain memberikan kontribusi akademis dengan memperkaya kajian empiris di bidang ekonomi pembangunan daerah, hasil penelitian ini juga memiliki nilai praktis bagi pembuat kebijakan di NTT. Dengan mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan, pemerintah daerah dapat menyusun strategi alokasi anggaran dan kebijakan investasi yang lebih efektif untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam upaya peningkatan kinerja ekonomi dan penurunan kemiskinan yang berkelanjutan di wilayah Nusa Tenggara Timur.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma asosiatif untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap tingkat kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi pada 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2017–2023. Lokasi penelitian dipilih karena tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tergolong tinggi dibandingkan wilayah lain. Variabel yang dianalisis meliputi pengeluaran pemerintah dan investasi sebagai variabel bebas, pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening, serta tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat. Pengeluaran pemerintah dan investasi diukur berdasarkan nilai realisasi (ribu rupiah), pertumbuhan ekonomi diukur melalui persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan tingkat kemiskinan diukur berdasarkan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (Sugiyono, 2013; Badan Pusat Statistik). Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh

dari Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipan dengan mengamati, mencatat, dan mendokumentasikan data dari instansi terkait tanpa keterlibatan langsung peneliti (Sugiyono, 2007).

Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan karakteristik variabel penelitian, kemudian diolah menggunakan program *EViews* dengan metode regresi data panel yang menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui Uji Chow dan Uji Hausman untuk menentukan model *Common Effect*, *Fixed Effect*, atau *Random Effect* yang paling sesuai (Effendi & Setiawan, 2013). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan *Path Analysis* untuk menganalisis pengaruh langsung maupun tidak langsung antarvariabel. Model struktural penelitian terdiri atas dua persamaan, yaitu pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Besarnya pengaruh tidak langsung diperoleh melalui perkalian koefisien jalur, sedangkan total pengaruh dihitung dari penjumlahan pengaruh langsung dan tidak langsung. Kelayakan model diukur menggunakan koefisien determinasi (R^2) dan *standard error of estimate*, sehingga hasil analisis mampu menjelaskan hubungan kausal antarvariabel secara empiris sesuai kerangka penelitian (Suyana Utama, 2012).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan investasi *Penanaman Modal Dalam Negeri* (PMDN) selama 2017–2023 juga menunjukkan dinamika yang berfluktuasi dan belum merata antarwilayah. Kabupaten Kupang, Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Kota Kupang secara konsisten mencatat nilai investasi yang relatif tinggi, mencerminkan keunggulan dari sisi potensi ekonomi, infrastruktur, dan kemudahan pelayanan investasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerataan investasi masih diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta mempercepat pengentasan kemiskinan, terutama di wilayah yang masih memiliki tingkat investasi rendah. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode 2017–2019 cenderung stabil dengan laju pertumbuhan sekitar 4–6 persen, di mana Kota Kupang, Manggarai Barat, dan Rote Ndao menjadi daerah dengan pertumbuhan relatif lebih tinggi. Namun, pada tahun 2020 hampir seluruh wilayah mengalami perlambatan bahkan kontraksi akibat pandemi COVID-19. Sejak 2021 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi kembali menunjukkan tren pemulihan di hampir seluruh kabupaten/kota, meskipun masih

terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan antarwilayah yang mencerminkan ketimpangan kapasitas pembangunan daerah.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi, tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 2017–2023 secara umum menunjukkan tren menurun, meskipun terdapat disparitas yang cukup besar antar kabupaten/kota. Penurunan kemiskinan sempat melambat pada 2020–2021 akibat dampak pandemi terhadap aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat, kemudian kembali menurun pada 2022–2023 seiring membaiknya kondisi ekonomi serta implementasi berbagai program penanggulangan kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dalam mendukung penurunan tingkat kemiskinan, meskipun ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif.

	Pp	Investasi	Pe	Kemiskinan
Mean	1.01000000	2.780000000	3.415779	21.59013
Maximum	1.65000000	9.80000000	6.83	36.01
Minimum	5.2100000	1.14000000	-2.05	8.61
Std. Dev.	2.43000000	2.670000000	1.953317	7.059453
Observations	154	154	154	154

Sumber : Diolah oleh peneliti.

Analisis Regresi Data Panel

Penentuan Kelayakan Persamaan Model Data Panel (Uji Chow (Chow Test))

Tabel 2. Hasil Uji Chow.

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	601.150637	(21,129)	0.0000
Cross-section Chi-square	707.433222	21	0.0000

Sumber : Diolah oleh peneliti.

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh nilai prob. Sebesar $0.0000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya berdasarkan hasil tersebut, maka model yang dipilih adalah *fixed effect model*.

Uji Hausman (Hausman Test)

Uji Hausman dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan menganut *fixed effect* atau *random effect*. Hasil pengujian ditunjukkan pada table berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman.

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.771609	3	0.6211

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh nilai prob. Sebesar $0.6211 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya berdasarkan hasil tersebut, maka model yang dipilih adalah *random effect model*. Berdasarkan hasil dari penentuan model yang dipilih antara *Fixed Effect* dan *Random Effect* dengan Uji Chow dan Uji Hausman dapat disimpulkan bahwa model yang dipilih adalah model *random effect* yang menentukan *Generalized Least Square* (GLS) layak untuk digunakan.

Path Analisis (*Path Analysis*)

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.479517	0.721734	4.821053	0.0000
PP	-1.95E-11	6.85E-10	-0.028462	0.9773
INVESTASI	-1.59E-12	6.23E-12	-0.254467	0.7995

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Tabel 4 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah (PP) dengan nilai Prob. $0.9773 > 0.05$ dan *Coefficient* -1.95 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Investasi dengan nilai Prob. $0.7995 > 0.05$ dan *Coefficient* - 1.59 menunjukkan bahwa Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Uji Hipotesis Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji hipotesis pengaruh langsung menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2017–2023. Berdasarkan hasil estimasi menggunakan *EViews*, variabel pengeluaran pemerintah memiliki nilai *coefficient* sebesar -1,950 dengan nilai *probability* sebesar 0,9773 ($>0,05$), sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian pula, variabel investasi memperoleh nilai *coefficient* sebesar -1,590 dengan nilai *probability* sebesar 0,7995 ($>0,05$), sehingga H_0 juga diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian, investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode penelitian.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	22.49580	1.668891	13.47949	0.0000
PP	-1.06E-09	5.56E-10	-1.915125	0.0574
INVESTASI	-5.04E-12	2.64E-12	-1.910643	0.0580
PE	0.089703	0.032058	2.798097	0.0058

Sumber: Diolah oleh peneliti

Hasil pengujian pada Tabel 5 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dengan nilai Prob. yaitu $0.0574 < 0.05$ dan *Coefficient* -1.060 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Investasi memiliki nilai Prob. $0.0580 < 0.05$ dan *Coefficient* -5.040 menunjukkan bahwa Investasi berpengaruh negatif namun signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai Prob. $0.0058 < 0.05$ dan *Coefficient* 0.089 menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Uji Hipotesis Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil uji hipotesis pengaruh langsung menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2017–2023. Berdasarkan hasil estimasi menggunakan *EViews*, variabel pengeluaran pemerintah memiliki nilai *coefficient* sebesar -1,060 dengan nilai *probability* sebesar 0,0574, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Variabel investasi juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai *coefficient* sebesar -5,040 dan nilai *probability* sebesar 0,0580, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai *coefficient* sebesar 0,089 dan nilai *probability* sebesar 0,0058 ($< 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi cenderung mampu menurunkan tingkat kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dalam periode penelitian justru berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan.

Pemeriksaan Validitas Model

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 10,6 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 10,6 persen dapat dijelaskan oleh model,

sedangkan sisanya yaitu 89,4 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model $R^2 = 1 - (Pe)^2 (Pe)^2$; m, 1, 2 = $1 - (0.999)^2 (0.946)^2 = 0.106$. Keterangan: R^2 : Koefisien determinasi total, e1, e2 : Nilai kekeliruan taksiran standar

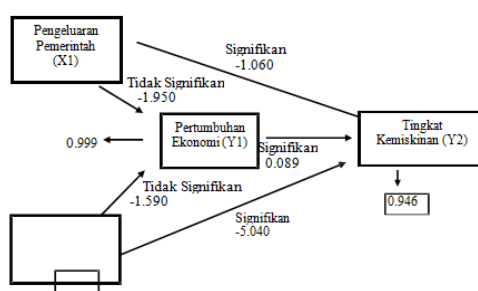
Uji Pengaruh Langsung (Path Coefficient)

Tabel 6. Pengaruh Langsung Antar Variabel Penelitian.

Hubungan Antarvariabel	Coefficient	Std Error	T-statistic	Prob.	Keterangan
X1 → Y1	-1.950	6.850	-0.028	0.9773	Negatif dan Tidak Signifikan
X1 → Y2	-1.060	5.560	-1.915	0.0574	Negatif dan Signifikan
X2 → Y1	-1.590	6.230	-0.254	0.7995	Negatif dan Tidak Signifikan
X2 → Y2	-5.040	2.640	-1.910	0.0580	Negatif namun Signifikan
Y1 → Y2	0.089	0.032	2.798	0.0058	Positif dan Signifikan

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Keterangan: X1: Pengeluaran Pemerintah; X2: Investasi; Y1: Pertumbuhan Ekonomi; Y2 : Tingkat Kemiskinan. Berdasarkan Tabel 6, pengeluaran pemerintah (X1) dan investasi (X2) sama-sama berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1), yang ditunjukkan oleh nilai *probability* masing-masing sebesar 0,9773 dan 0,7995. Terhadap tingkat kemiskinan (Y2), pengeluaran pemerintah (X1) berpengaruh negatif dengan nilai *probability* sebesar 0,0574, sedangkan investasi (X2) juga berpengaruh negatif dengan nilai *probability* sebesar 0,0580. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi (Y1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y2) dengan nilai *probability* sebesar 0,0058. Berdasarkan diagram jalur pada Gambar 1 dan Tabel 6, persamaan struktural yang diperoleh adalah $Y1 = -1,950X1 - 1,590X2$ dan $Y2 = -1,060X1 - 5,040X2 + 0,089Y1$, yang menggambarkan hubungan antarvariabel dalam penelitian ini.



dipengaruhi oleh variable pertumbuhan ekonomi (Y1) dengan koefisien jalur sebesar 0.089. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah (X1) dan investasi (X2) memiliki pengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan (Y2) dengan koefisien jalur sebesar -1.060 (pengeluaran pemerintah dan -5.040 (investasi).

Uji Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*) Uji Sobel

Tabel 7. Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*) Variabel Penelitian.

Hubungan Antarvariabel	Variabel Mediasi	Axb	Sab	Z	Keterangan
X1 Y2	Y1	-0.173	0.612	-0.283	Tidak Signifikan
X2 Y2	Y1	-0.141	0.556	-0.254	Tidak Signifikan

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Keterangan: X1 :Pengeluaran Pemerintah; X2 : Investasi; Y1 : Pertumbuhan Ekonomi; Y2 : Tingkat Kemiskinan. Berdasarkan Tabel 7, menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung variabel pengeluaran pemerintah (X1) terhadap tingkat kemiskinan (Y2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y1) memiliki nilai Z sebesar -0.283 lebih kecil dari 1,96. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung pengeluaran pemerintah (X1) melalui pertumbuhan ekonomi (Y1) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Pengaruh tidak langsung variabel investasi (X2) terhadap tingkat kemiskinan (Y2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y1) memiliki nilai Z sebesar - 0.254 lebih kecil dari 1,96. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung variabel investasi (X2) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Y2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y1)

Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total

Tabel 8. Koefisien Hubungan Langsung, Tidak Langsung, dan Total Antarvariabel.

Hubungan Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh Total
X ₁ → Y ₁	-1.950	—	-1.950
X ₁ → Y ₂	-1.060	-0.283	-1.343
X ₂ → Y ₁	-1.590	—	-1.590
X ₂ → Y ₂	-5.040	-0.254	-5.294
Y ₁ → Y ₂	0.089	—	0.089

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Berdasarkan uraian di atas, Tabel 8 dapat diketahui nilai pengaruh langsung pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -1.950. Pengaruh langsung investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -1.590. Pengaruh langsung pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan sebesar - 1.060. Pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan sebesar -5.040. Pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan sebesar 0.089. Pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah terhadap tingkat

kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar -0.283. Nilai pengaruh tidak langsung investasi terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 0.254.

Pembahasan

Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara ekonometrik, hasil ini berarti bahwa perubahan pada pengeluaran pemerintah tidak memberikan dampak yang berarti terhadap naik turunnya pertumbuhan ekonomi di NTT selama periode penelitian. Secara empiris, kondisi ini diperkuat oleh karakteristik perekonomian Nusa Tenggara Timur. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, laju pertumbuhan ekonomi tahunan provinsi ini relatif moderat, misalnya tercatat tumbuh sekitar 3,52 % pada 2023 meskipun terdapat fluktuasi antar-tahun (y-on-y) pada 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti investasi swasta, konsumsi rumah tangga atau ekspor mungkin lebih dominan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah semata. Secara teoritis, menurut teori pertumbuhan endogen yang dikemukakan oleh Robert J. Barro (1990), pengeluaran pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dialokasikan secara produktif, seperti pada sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.

Namun, apabila pengeluaran pemerintah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin atau konsumtif, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal, bahkan dapat menimbulkan efek crowding out terhadap investasi swasta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Devarajan, Swaroop, dan Zou dalam jurnal berjudul *The Composition of Public Expenditure and Economic Growth* (1996) yang menemukan bahwa komposisi belanja pemerintah di negara berkembang tidak selalu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama ketika proporsi belanja tidak produktif lebih dominan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus negara berkembang, pengeluaran pemerintah tidak selalu berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama ketika kualitas belanja dan efektivitas anggaran belum optimal. Studi yang dipublikasikan dalam jurnal *Cogent Economics & Finance* (2023) menemukan bahwa besarnya ukuran belanja pemerintah tidak secara otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa didukung oleh tata kelola fiskal yang baik dan komposisi belanja yang produktif.

Pengaruh Langsung Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini menggambarkan bahwa peningkatan realisasi investasi di NTT selama periode tahun 2017 sampai 2023 belum mampu mendorong peningkatan output daerah secara nyata. Secara empiris, meskipun terdapat peningkatan nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), kontribusinya terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) relatif kecil dan belum merata antarwilayah. Struktur ekonomi NTT yang masih didominasi oleh sektor pertanian tradisional dengan produktivitas rendah menyebabkan investasi yang masuk belum sepenuhnya terintegrasi dengan basis ekonomi lokal. Akibatnya, peningkatan investasi tidak secara langsung meningkatkan kapasitas produksi daerah. Selain itu, karakteristik geografis NTT yang kepulauan, keterbatasan infrastruktur dasar, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia turut memengaruhi efektivitas investasi. Banyak investasi yang bersifat padat modal dan terkonsentrasi pada sektor tertentu seperti pertambangan atau proyek berskala besar yang tidak memiliki keterkaitan kuat (*linkage effect*) dengan sektor ekonomi rakyat. Kondisi ini menyebabkan manfaat ekonomi tidak menyebar luas dan tidak menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

Dalam kerangka teori pertumbuhan neoklasik yang dikemukakan oleh Robert Solow (1956), investasi seharusnya meningkatkan akumulasi modal dan pertumbuhan output. Namun, dalam konteks NTT, keterbatasan faktor pendukung seperti infrastruktur, teknologi, dan kualitas tenaga kerja menyebabkan investasi belum mampu berfungsi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dikemukakan oleh Dani Rodrik (2018) menegaskan bahwa dampak investasi terhadap pertumbuhan sangat bergantung pada struktur ekonomi, kapasitas institusi, dan kesiapan sektor domestik dalam menyerap modal. Sejalan dengan itu, William Easterly menyatakan bahwa akumulasi modal tanpa dukungan tata kelola dan efisiensi alokasi sumber daya tidak akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, laporan terbaru dari World Bank (2023) mengenai pembangunan wilayah berkembang menunjukkan bahwa di banyak daerah tertinggal, investasi sering kali tidak berdampak signifikan terhadap output regional karena lemahnya keterkaitan antar sektor (*weak intersectoral linkage*), rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta terbatasnya infrastruktur pendukung. Dengan demikian, kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa dalam

konteks NTT, efektivitas investasi sangat dipengaruhi oleh faktor struktural dan kualitas pembangunan daerah itu sendiri.

Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini mencerminkan bahwa belanja pemerintah daerah di NTT telah berperan dalam mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan. Mengingat NTT merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi di Indonesia, intervensi fiskal pemerintah menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya beli masyarakat dan membuka akses ekonomi bagi kelompok berpendapatan rendah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Martin Ravallion yang menyatakan bahwa belanja publik yang terarah pada kelompok miskin memiliki dampak signifikan dalam menurunkan kemiskinan, khususnya di negara dan daerah berkembang. Selain itu, studi David Dollar dan Aart Kraay (2002) menunjukkan bahwa pertumbuhan yang didukung kebijakan fiskal pro-poor berkontribusi langsung terhadap pengurangan kemiskinan. Laporan terbaru dari World Bank (2023) juga menegaskan bahwa peningkatan efektivitas belanja pemerintah daerah, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, terbukti signifikan dalam menekan tingkat kemiskinan di wilayah berkembang. Dengan demikian, hasil penelitian ini konsisten dengan teori dan bukti empiris bahwa pengeluaran pemerintah merupakan instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan.

Pengaruh Langsung Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh investasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di NTT telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Meskipun kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sebelumnya tidak signifikan, namun dalam konteks kemiskinan, investasi terbukti mampu memperluas aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja lokal, khususnya pada sektor-sektor produktif seperti pertanian modern, pariwisata, dan usaha kecil menengah.

Secara struktural, perekonomian NTT yang masih menghadapi keterbatasan lapangan kerja formal membuat investasi menjadi salah satu sumber penting penciptaan kesempatan kerja baru. Masuknya investasi dapat mendorong pembangunan infrastruktur pendukung, membuka akses pasar, serta meningkatkan permintaan tenaga kerja, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Dalam teori pembangunan ekonomi, investasi memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan konsumsi masyarakat. Dengan demikian, signifikansi negatif variabel investasi terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa investasi di NTT memiliki peran strategis dalam proses pengurangan kemiskinan, meskipun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi agregat belum optimal. Penelitian oleh Rinaldi dan Suhariato (2024) dalam *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi* menemukan bahwa investasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan bahwa peningkatan realisasi investasi berkontribusi pada penurunan jumlah penduduk miskin. Selain itu, studi oleh Nst dan Mellita (2022) dalam *Journal of Malikussaleh Public Economics* menunjukkan bahwa domestic investment secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pengaruh Langsung Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Artinya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan menurun, karena pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi pengurangan kemiskinan. Adanya syarat kecukupannya adalah pertumbuhan tersebut harus efektif mengurangi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung pertumbuhan perlu dipastikan terjadi di setiap sektor-sektor dimana orang miskin bekerja (pertanian atau sektor padat karya) dan secara tidak langsung diperlukan pemerintah yang cukup efektif redistribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang didapatkan dari sektor modern seperti jasa manufaktur yang padat modal ke golongan penduduk miskin (Siregar, 2008). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang pernah ditulis oleh Kembar tahun 2013, yang menegaskan bahwa persoalan kemiskinan tidak bisa teratasi hanya dengan meningkatkan tingkat pendidikan dan meningkatkan PDRB per kapita saja, karena diharapkan adanya dampak menetes ke bawah (*trickle down effect*).

Syarat untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan adanya pengembangan industri pertanian dan pedesaan, distribusi pendapatan yang adil, serta peningkatan modal manusia secara cepat. Untuk meningkatkan penghasilan, terutama dari usaha kecil dan menengah, diperlukan lingkungan usaha yang lebih baik. Ini bisa dicapai dengan mendirikan lembaga pembiayaan mikro yang memberi manfaat bagi warga yang berpenghasilan rendah. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten atau Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur memberi dampak baik pada jumlah orang yang miskin. Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB per kapita telah berhasil mengurangi jumlah penduduk yang tinggal dalam keadaan miskin di kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meskipun masih banyak orang miskin yang tinggal di pedesaan, secara umum pertumbuhan PDRB per kapita sudah cukup baik dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Pengaruh Tidak Langsung Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, pertumbuhan ekonomi tidak berperan sebagai variabel yang memengaruhi pengeluaran pemerintah dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Artinya pengeluaran yang dilakukan pemerintah belum cukup berhasil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga tidak bisa secara langsung mengurangi angka kemiskinan, karena pengeluaran pemerintah diharapkan bisa memacu investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga secara langsung atau tidak langsung bisa mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia et al., (2015), yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak langsung dan tidak langsung dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Efek langsung terlihat dalam bentuk manfaat yang didapatkan dari pengeluaran yang dilakukan dalam program kerja dan kesejahteraan. Efek tidak langsung terjadi ketika pemerintah melakukan investasi di bidang infrastruktur desa, pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Dampaknya adalah pertumbuhan di bidang pertanian dan non-pertanian yang menciptakan lebih banyak pekerjaan, kesempatan untuk mendapatkan penghasilan bagi masyarakat miskin, serta harga bahan makanan yang lebih terjangkau. Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan penurunan tingkat kemiskinan berasal dari tiga hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan upah. Penambahan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan permintaan total dalam perekonomian. Permintaan akan tenaga kerja meningkat karena permintaan keseluruhan meningkat, sehingga meningkatkan produktivitas

tenaga kerja tersebut. Peluang kerja yang lebih besar dan peningkatan produktivitas mengarah pada dua jalur. Pertama, peningkatan upah berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan, dan kedua, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dapat meningkatkan belanja pemerintah dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pengaruh Tidak Langsung Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi bukan menjadi variabel yang memengaruhi hubungan antara investasi dan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Artinya, investasi yang ada saat ini belum cukup baik dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan adanya investasi dari pihak swasta, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perlu ada upaya untuk mendorong investasi yang lebih seimbang dan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) dan mengurangi kemiskinan di daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yolanda, et al., (2017) yang menyatakan bahwa investasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu sumber penghasilan atau pendapatan yang digunakan membeli barang dan jasa yang dibutuhkan.

Investasi juga memberikan manfaat tambahan, yang merupakan hasil dari proses produksi, serta menjadi sumber penghasilan atau kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Kegiatan investasi ini membantu masyarakat terus meningkatkan usaha ekonomi, menciptakan peluang kerja, serta mengangkat pendapatan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi juga berpengaruh pada peningkatan modal, yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pengangguran. Perkembangan investasi baru bisa terjadi jika masyarakat mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka bisa meningkatkan penghasilan dan kualitas hidupnya. Artinya, investasi dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan, sehingga mengurangi jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan pengangguran berkurang, kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan kemiskinan dapat berkurang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yakni sebagai berikut: Pengeluaran pemerintah dan Investasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Artinya Ketika

pengeluaran pemerintah dan investasi meningkat maka pertumbuhan ekonomi cenderung menurun, namun pengaruh tersebut tidak signifikan sehingga peningkatan atau penurunan pengeluaran pemerintah dan investasi tidak terbukti secara nyata memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Investasi memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memediasi pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR REFERENSI

- Abel, Y., Nooraeni, R., & Lestariningsih, E. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan secara langsung dan tidak langsung di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Statistika Terapan*, 3(1), 78–89.
- Akhmad, A., Sari, D., & Rahman, A. (2022). Effectiveness of regional government expenditure in reducing unemployment and poverty rate. *E-Journal of Development Economics*, 11(1), 45–59. <https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2022.2.4.129>
- Akudugu, J. A. (2012). Accountability in local government revenue management: Who does what? *Information and Knowledge Management*, 2(8), 22–33.
- Al Husna, N., & Yudhistira, M. H. (2017). Studi empirik interaksi strategis pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), 113–124. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.v10.i02.p02>
- Al Mahdali, F., & Saharuddin, S. (2023). The effect of government investment and spending on poverty in Indonesia (2008–2020). *Jurnal Manajemen dan Pembangunan Ekonomi*, 4(1), 45–60.
- Arsyad, L. (1999). *Ekonomi pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan* (4th ed.). STIE YKPN.
- Balisacan, A., Pernia, E. M., & Asra, A. (2003). Revisiting growth and poverty in Indonesia: What do subnational data show? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(3), 329–351. <https://doi.org/10.1080/0007491032000142782>
- Bellinger, W. K. (2007). *The economics analysis of public policy*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203946480>
- Bergh, A., & Nilsson, T. (2014); Burtless, G., & Smeeding, T. M. (2001); Haisley, E., Mostafa, R., & Loewenstein, G. (2008). (*Sebagaimana dikutip dalam ulasan konsep kemiskinan absolut dan relatif*).
- Cooray, A. (2009). Government expenditure, governance and economic growth. *Constitutional Political Economy*, 20(3–4), 401–418.

- Effendi, N., & Setiawan, M. (2013). *Ekonometrika: Pendekatan teori dan terapan*. Salemba Empat.
- Fauzi, M., Rahman, H., & Lestari, D. (2022). Pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 7(2), 120–135.
- Fikri, R. O., & Suparyati, A. (2017). Pengaruh pendidikan, kesehatan, dan gender terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Media Ekonomi*, 25(1), 43–56. <https://doi.org/10.25105/me.v25i1.5203>
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(3).
- Suyana Utama, M. (2012). *Aplikasi analisis kuantitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Erlangga.
- Todaro, M. P. (2004). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga* (8th ed.). Erlangga.
- Todaro, M. P. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education Limited.
- Tuati, N. F., Manuain, D. W., & Usman, H. (2024). Pengaruh pertumbuhan PAD dan belanja modal terhadap *fiscal stress* pada pemerintah kabupaten/kota di NTT. *Jurnal Revolusi Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 45–57.